

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah sebuah proses terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor utama dalam mendorong kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Tujuan utama pendidikan adalah sebagai media dalam mengembangkan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa depan (Tabuni et al., 2024). Pendidikan menjadi salah satu hak utama yang harus diperoleh oleh setiap warga negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara secara merata. Hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas merupakan landasan penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan (Hasanah, 2022).

Sebagai upaya mewujudkan amanat konstitusi tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang mencakup pendidikan tinggi. Di Indonesia tingkat partisipasi pendidikan diukur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang mencerminkan tingkat kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dibedakan berdasarkan empat

kelompok usia yang mewakili tahapan SD, SMP, SMP dan Perguruan Tinggi. Semakin tinggi capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) suatu wilayah maka semakin besar pula proporsi penduduk yang memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan sebagaimana jenjang usianya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam mengikuti pendidikan dalam sebuah jenjang pendidikan tanpa memperhatikan kesesuaian usia ideal peserta didik. APK merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar daya tampung suatu jenjang pendidikan dalam menjangkau penduduk usia sekolah secara keseluruhan. Semakin tinggi APK menandakan semakin besarnya jumlah anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan proporsi penduduk usia sekolah yang telah dapat mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Angka Partisipasi Murni (APM) menjadi indikator guna melihat sejauh mana anak-anak dapat mengakses pendidikan tepat waktu sebagaimana batas usia resmi pada jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi Angka Partisipasi Murni (APM) pada suatu jenjang pendidikan menunjukkan pendidikan berjalan secara efektif dalam menampung peserta didik pada usia yang sesuai sekaligus mencegah terjadinya keterlambatan masuk atau putus sekolah (Rakyat, 2024).

**Tabel 1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK),
Angka Partisipasi Murni (APM) Nasional Tahun 2020-2024**

Tahun	Kelompok Umur											
	7-12 Tahun SD			13-15 Tahun SMP			16-18 Tahun SMA			19-23 Tahun PT		
	APS	APK	APM	APS	APK	APM	APS	APK	APM	APS	APK	APM
2020	99.21	105.97	97.65	95.52	88.94	80.02	71.44	78.61	61.03	25.03	30.85	21.15
2021	99.12	105.79	97.72	95.85	85.86	80.47	70.74	80.17	61.47	25.97	31.19	21.59
2022	99.01	106.14	97.78	95.81	87.76	80.82	72.88	80.17	61.73	26.46	31.16	22.01
2023	99.12	105.28	97.86	95.99	91.25	81.28	73.07	81.68	62.36	26.82	31.45	21.73
2024	99.17	104.79	97.93	96.02	90.67	81.63	74.35	84.40	64.06	28.06	32.00	21.75

Sumber : Website bps.go.id <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTUyNSMx/indikator-pendidikan-1994-2021.html>

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antar jenjang pendidikan. Pada jenjang SD, SMP, SMA angka partisipasi APK, APS, dan APM masih tinggi. Namun, memasuki jenjang perguruan tinggi terjadi penurunan signifikan yang menunjukkan bahwa tidak semua lulusan sekolah menengah mampu meneruskan pendidikan hingga perguruan tinggi. Kondisi demikian menjelaskan bahwa meskipun tingkat partisipasi jenjang pendidikan SD, SMP, SMA merata tetapi masih terdapat gap besar pada transisi menuju perguruan yang memperlihatkan kesenjangan dalam akses pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar lulusan SMA/ sederajat telah berhasil menyelesaikan pendidikan menengah namun tidak semua dari mereka melanjutkan ke pendidikan tinggi. Penyebab utama kesenjangan ini yakni masalah ekonomi. Mahalnya biaya yang diperlukan untuk menempuh perguruan tinggi menjadi kendala utama bagi individu yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Biaya pendidikan tinggi tidak hanya mencakup biaya akademik seperti Sumbangan Pengembangan Institusi

(SPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tetapi juga meliputi biaya operasional seperti biaya hidup, akomodasi, transportasi, buku, dan kebutuhan akademik lainnya (Rakyat, 2025).

Tabel 1.2 Rata-Rata Total Biaya Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan (juta rupiah), Tahun Ajaran 2023/2024

Jenjang Pendidikan	Rata-rata Biaya Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024
SD Sederajat	4,56 Juta
SMP Sederajat	7,34 Juta
SMA/SMK Sederajat	10,19 Juta
Pendidikan Tinggi	19,01 Juta

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) 2024

Berdasarkan data tabel 1.2 menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka rata-rata total biaya pendidikan yang dibayarkan semakin besar. Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, faktor ekonomi menjadi hambatan utama dalam mengakses pendidikan tinggi. Keterbatasan akses pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi lemah menyebabkan peluang mereka untuk meningkatkan kesejahteraan semakin kecil sehingga keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan berpotensi terangkap dalam lingkaran kemiskinan.

Kondisi kesenjangan akses pendidikan bukan sebatas disebabkan oleh faktor ekonomi semata tetapi juga dipengaruhi oleh masalah pemerataan sumber daya pendidikan di berbagai wilayah. Pemerataan pendidikan merupakan upaya untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang. Konsep pemerataan yang dimaksud

meliputi dua aspek penting yakni persamaan kesempatan dalam memperoleh pendidikan dan keadilan dalam mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Untuk mewujudkannya diperlukan sumber daya pendidikan meliputi tenaga pendidik dan sarana prasarana yang nyaman. Namun dalam praktiknya pemerataan sumber daya pendidikan masih menghadapi tantangan yang terlihat dari kesenjangan capaian pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Sugiyarti, 2024)

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, hanya 27,98% masyarakat pedesaan berusia 15 tahun keatas yang menyelesaikan pendidikan menengah sementara di perkotaan mencapai 49,16%. Mayoritas di pedesaan hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang SD yakni sebesar 31,13% yang mencerminkan terbatasnya akses dan kesempatan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu tantangan terletak pada belum meratanya distribusi sumber daya pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kesenjangan ini terlihat pada perbedaan dalam penyediaan infrastruktur pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil yang menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.

Faktor sosial budaya juga turut memperburuk kesenjangan akses pendidikan tinggi. Pandangan negatif dan rendahnya kesadaran masyarakat terutama di wilayah pedesaan dan keluarga berpendidikan rendah terhadap pentingnya pendidikan lanjutan menjadi hambatan sosial yang mempersempit peluang bagi kelompok rentan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Stigma sosial yang menganggap bahwa pendidikan tinggi hanya untuk kalangan tertentu ditambah

dengan tekanan ekonomi yang memaksa anak dari keluarga kurang mampu untuk bekerja membantu keluarga yang menciptakan siklus yang terus berulang dan sulit untuk diputus. Kondisi ini turut memicu lahirnya kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga menyebabkan kesulitan dalam mencari pekerjaan (Khairunnisa, 2024). Rendahnya tingkat pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang kompetitif. Berdasarkan data BPS tahun 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur mencapai 3,88% sementara Kota Madiun mencapai 4,29%, menunjukkan bahwa Tingkat pengangguran di Kota Madiun berada di atas rata-rata provinsi.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak dan kewajiban warga negara atas pendidikan yang bermutu. Kebijakan ini menegaskan bahwa pendidikan menjadi hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun sehingga perlu untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas. Upaya pembangunan pendidikan merupakan langkah strategis untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup. Melalui pendidikan yang berkualitas individu diharapkan mampu keluar dari permasalahan sosial berupa kebodohan dan kemiskinan (Amalia, Rizki & Puspytasari, 2018).

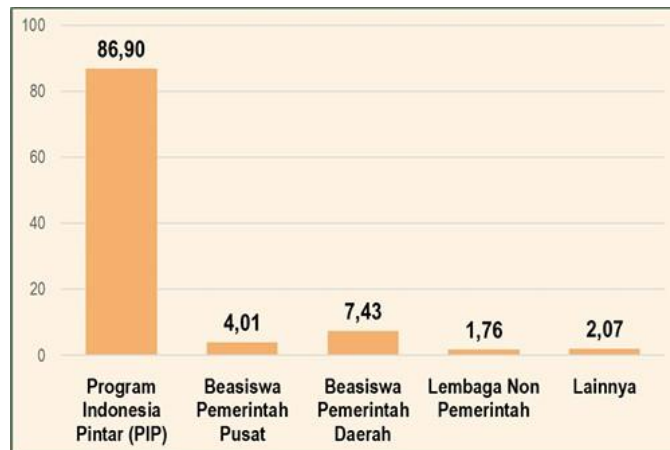
Salah satu langkah strategis dalam menjamin terpenuhinya hak warga negara dalam memperoleh pendidikan melalui penyediaan program beasiswa. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Pendanaan Pendidikan, pemerintah pusat dan daerah wajib mengalokasikan anggaran guna membantu masyarakat miskin agar tetap dapat

mengenyam pendidikan. Pemerintah dapat menyalurkan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa kepada peserta didik berprestasi atau bantuan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah daerah wajib mengalokasikan 20% dari APBD untuk sektor pendidikan sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas layanan pendidikan. Beasiswa merupakan bantuan biaya pendidikan bagi jenjang sekolah maupun perguruan tinggi yang mengalami keterbatasan ekonomi. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran proses belajar serta menjamin keberlanjutan pendidikan yang sedang ditempuh. Selain itu, beasiswa dapat dimaknai sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga tertentu kepada siswa atau mahasiswa yang berprestasi (Dwi et al., 2024).

Pemberian beasiswa bertujuan untuk memperluas pemerataan akses pendidikan serta peluang belajar bagi mahasiswa yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan mempertahankan semangat belajar mahasiswa agar mampu menyelesaikan pendidikannya secara tepat waktu. Penyaluran beasiswa yang tepat sasaran yang ditunjang dengan evaluasi yang berkesinambungan dapat membantu menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.

Pada tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai program beasiswa untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) tercatat telah menyalurkan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) kepada mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3. Selain Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) pemerintah juga mengembangkan berbagai

skema bantuan pendidikan seperti beasiswa unggulan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) (Hayati & Rahmawati, 2025).



Gambar 1.1 Presentase Peserta Didik Penerima Beasiswa/Bantuan Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan (juta rupiah), Tahun Ajaran 2023/2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) 2024

Beragam program beasiswa tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, penerapan program beasiswa nasional masih menghadapi keterbatasan jangkauan di mana sebagian calon mahasiswa berpotensi belum memperoleh akses terhadap bantuan pendidikan karena keterbatasan kuota maupun mekanisme seleksi.

Sebagai respon terhadap keterbatasan dari cakupan program beasiswa nasional dan untuk menyesuaikan dengan karakteristik kebutuhan masyarakat di tingkat lokal maka pemerintah daerah Indonesia mengambil langkah inisiatif dengan mengembangkan program beasiswa daerah. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayahnya masing-masing. Salah satu daerah yang menerapkan

program beasiswa daerah yaitu Kota Madiun. Program bantuan pendidikan yang diberikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang dikenal dengan nama *Be Smart* (Beasiswa Mahasiswa Rakyat). Dasar pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun. Selanjutnya kebijakan tersebut disempurnakan melalui Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2025. Penyempurnaan regulasi ini bertujuan untuk memperjelas pengaturan terkait besaran bantuan, mekanisme penyaluran serta persyaratan bagi calon penerima beasiswa.

Kemudian pemilihan lokasi penelitian berada pada Kota Madiun dengan Dinas Pendidikan sebagai badan penyelenggara Program *Be Smart* (Beasiswa Mahasiswa Rakyat). Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada alasan yaitu, Kota Madiun sebagai salah satu kota di Jawa Timur memiliki permasalahan kemiskinan yang memerlukan perhatian serius dalam konteks akses pendidikan tinggi. Kondisi partisipasi pendidikan di Kota Madiun dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM) menampilkan gambaran secara menyeluruh tentang akses dan partisipasi dalam pendidikan. Kota Madiun telah mencapai capaian yang cukup baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tetapi masih terdapat kesenjangan partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi. Kondisi partisipasi perguruan tinggi di Kota Madiun masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan dibawahnya yang menandakan tidak sedikit lulusan SMA/Sederajat yang tidak meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi (BPS Kota Madiun, 2025). Kondisi ini

mencerminkan adanya putus alur pendidikan yang terjadi pada transisi dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi yang memiliki kaitan dengan kendala ekonomi.

Tabel 1.3 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Presentase Penduduk Miskin
2020	8,83	4,98
2021	9,06	5,09
2022	8,49	4,76
2023	8,46	4,74
2024	7,84	4,38

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2024.

Angka kemiskinan di Kota Madiun menunjukkan adanya bagian masyarakat yang masih menghadapi kendala ekonomi guna melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kesenjangan partisipasi pendidikan jenjang menengah dan perguruan tinggi di Kota Madiun menjadi bukti dampak kemiskinan terhadap keberlanjutan pendidikan. Dengan ini Pemerintah Kota Madiun memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang melanjutkan kuliah melalui Program *Be Smart* (Beasiswa Mahasiswa Rakyat). Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Dr. Lismawati menyampaikan,

“Dengan pendidikan tinggi ini diharapkan lulusannya nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mengurangi angka kemiskinan di Kota Madiun” pada Senin (11/11/2024).

Sumber <https://madiuntoday.id/berita/2024/11/11/proses-seleksi-rampung-ratusan-mahasiswa-selangkah-lagi-dapat-beasiswa-bbm-pemkot-madiun?> diakses pada 09 Desember 2025 pukul 21.56.

Program ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan tinggi melalui bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu



Gambar 1.2 Informasi Beasiswa *Be Smart* Kota Madiun

Sumber : Website Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2025

<https://beasiswa.madiunkota.go.id/informasi/persyaratan-beasiswa-mahasiswa-rakyat-kota-madiun-be-smart-madiun>

Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan telah meluncurkan program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu pada tahun 2020 dengan nama Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM) yang kemudian pada tahun 2023 diubah menjadi *Be Smart* (Beasiswa Mahasiswa Rakyat). Dalam pengelolaan program *Be Smart* (Beasiswa Mahasiswa Rakyat) dilakukan melalui kerjasama beberapa instansi terkait. Dinas sosial Kota Madiun memiliki peran dalam melakukan verifikasi status sosial ekonomi pendaftar, tahap ini menekankan pentingnya memastikan calon penerima benar-benar tercantum di DTSEN, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Dr. Lismawati

“Sekarang tahap verifikasi data pendaftar utamanya untuk memverifikasi keaktifan sebagai peserta DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), kami minta bantuan ke Dinsos PPPA” pada Selasa (08/10/2024).

Sumber: <https://madiuntoday.id/berita/2024/10/08/program-be-smart-bbm-2024-masuki-tahap-verifikasi-data-ada-300-kuota-pengumuman-akhir-bulan-ini?> diakses pada 09 Desember 2025 pukul 23.38.

Sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun memiliki peran untuk memvalidasi data kependudukan, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menangani pengelolaan sistem dan website *Be Smart*. Sementara itu, kelurahan di seluruh wilayah Kota Madiun berperan dalam penyebaran informasi.

Program *Be Smart* (Beasiswa Mahasiswa Rakyat) dirancang sebagai program beasiswa yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa hingga mereka menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana. Besaran bantuan yang diberikan bervariasi berdasarkan lokasi perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah keresidenan Madiun yang meliputi Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, dan Pacitan mendapat beasiswa sebesar Rp. 500.000 setiap bulan, sedangkan mahasiswa yang menempuh pendidikan PTN di luar keresidenan Madiun mendapat beasiswa Rp. 750.000 setiap bulan. Cakupan program ini bukan hanya terbatas pada mahasiswa PTN namun turut mencakup mahasiswa PTS yang terakreditasi minimal B. Penyaluran dana beasiswa dilakukan melalui Bank Jatim dan ditransfer langsung ke rekening penerima dalam dua tahap, yakni pada bulan Juli dan Desember. Tujuan dari program *Be Smart* (Beasiswa Mahasiswa Rakyat) yaitu untuk memutus rantai kemiskinan di Kota Madiun. Selain itu, sesuai dengan arahan Wali Kota Madiun untuk mewujudkan satu keluarga satu sarjana. Program *Be Smart* merupakan inovasi pendidikan sejak tahun 2020 berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan. Persyaratan yang diperlukan

untuk mendaftar program *Be Smart* yaitu :

Tabel 1.4 Persyaratan Pendaftaran Program *Be Smart* Dinas Pendidikan Kota Madiun Berdasarkan Perwali Kota Madiun No 47 Tahun 2025

1. Surat pernyataan penghasilan, kepemilikan rumah, kendaraan, tanggungan keluarga dan tidak sedang atau mengajukan beasiswa lain yang bermaterai	6. IPK dan IPS terakhir minimal 3.00 (untuk mahasiswa lama)
2. Foto 3x4 background bebas	7. Surat keterangan lulus SMA/Sederajat dan penguuman telah di terima di perguruan tinggi (untuk mahasiswa baru)
3. Kartu Keluarga dan KTP	8. Surat keterangan akreditasi jurusan minimal B atau predikat baik sekali yang dikeluarkan oleh universitas
4. Tagihan PBB terbaru dan pembayaran listrik 3 bulan terakhir	9. Surat keterangan terdaftar aktif DTSEN yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Dinas Sosial Kota Madiun
5. Surat keterangan aktif mahasiswa yang dikeluarkan oleh universitas	10. Surat keterangan tidak sedang dalam pendaftaran dan menerima bantuan yang dikeluarkan oleh universitas

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2025

Alur seleksi penerima program *Be Smart* (Beasiswa Mahasiswa Rakyat) disusun secara sistematis untuk menjamin bahwa bantuan pendidikan benar- benar diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria kebutuhan finansial. Seleksi penerima difokuskan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya bagi pemohon yang telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kategori desil 1 hingga 5.

Tabel 1.5 Kategori Desil 1-5 Menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Kategori Desil	Kategori Keluarga	Pengeluaran Perbulan
Desil 1	Sangat miskin	< Rp. 500.000
Desil 2	Miskin	± Rp. 600.000 – Rp. 700.000
Desil 3	Hampir miskin	± Rp. 800.000 – Rp. 900.000.
Desil 4	Menengah bawah	± Rp. 1.000.000 – Rp. 1.200.000.

Desil 5	Menengah bawah (stabil)	± Rp. 1.300.000 – Rp. 1.500.000.
---------	----------------------------	-------------------------------------

Sumber: Website Kementerian Sosial, 2025

Pada implementasinya, proses seleksi yang diterapkan bersifat administratif yaitu dengan menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan yang dikirim ke website Program *Be Smart* <https://beasiswa.madiunkota.go.id> tanpa adanya tahapan tes atau wawancara lanjutan. Hal ini dilakukan karena Dinas Pendidikan Kota Madiun memfokuskan pada tujuan utama program, yakni memberikan kesempatan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Sejak diluncurkan pada tahun 2020, program *Be Smart* mengalami perkembangan yang signifikan baik dari sisi kuota maupun alokasi anggaran. Kuota penerima bantuan dan anggaran program *Be Smart* di Kota Madiun.

Tabel 1.6 Jumlah Penerima dan Anggaran Program *Be Smart* Kota Madiun Tahun 2020-2024

Tahun	Penerima	Anggaran
2020	700	5.050.000.000
2021	731	5.570.000.000
2022	1.000	7.050.000.000
2023	1.000	7.050.000.000
2024	952	7.050.000.000

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2025

Berdasarkan tabel 1.6 anggaran program *Be Smart* pada tahun 2023 dan 2024 tetap sama namun jumlah penerima pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena jumlah pendaftar mengalami penurunan. Akibat berkurangnya jumlah penerima tersebut sehingga sebagian dana yang tidak terserap dikembalikan ke rekening APBD. Setelah adanya Program *Be Smart* perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Madiun pada periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan.

Meskipun peningkatan tersebut tidak dapat secara langsung diartikan sebagai dampak tunggal dari Program *Be Smart*, namun keberadaan program turut mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu sehingga berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia di Kota Madiun.

Tabel 1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020-2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	74,82	74,84	75,11	75,40	75,67
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	14,40	14,41	14,43	14,44	14,54
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	11,14	11,37	11,67	11,82	12,11
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	16.018	16.095	16.503	17.115	17.518

Sumber : BPS Kota Madiun, 2025

Dengan kenaikan tersebut program menunjukkan bahwa program *Be Smart* telah mendorong peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi khususnya bagi mahasiswa kurang mampu. Namun banyak penerima program *Be Smart* tahun 2020-2021 yang belum lulus tepat waktu.

Tabel 1.8 Jumlah Lulusan Penerima program *Be Smart* Tahun 2020-2021 Yang Sudah Lulus

Tahun	Jumlah
2020	480
2021	355

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2026

Berdasarkan Tabel 1.8, masih banyak penerima Program *Be Smart* yang belum lulus tepat waktu sehingga berdampak pada belum optimalnya pencapaian target

kebijakan “1 Kartu Keluarga 1 Sarjana”. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan peningkatan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Akibatnya, output program belum sepenuhnya sejalan dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Dalam menganalisis dan mendeskripsikannya penulis memilih teori efektivitas dikemukakan oleh Duncan (1973), teori ini menggunakan tiga aspek kriteria untuk mengukur efektivitas program diantaranya *goal achievement* (pencapaian tujuan), *integration* (integrasi), *adaptation* (adaptasi). *Goal achievement* (pencapaian tujuan) difokuskan pada sejauh mana program mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada aspek ini masih ditemukan kesenjangan dalam pelaksanaan program dengan tujuan program yang tercantum dalam Perwali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2025. Secara administratif program dinilai berhasil karena mampu menyalurkan bantuan setiap tahun dan berkontribusi pada peningkatan IPM di Kota Madiun. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterlambatan pencairan dana beasiswa yang menyebabkan penerima kesulitan membayar UKT tepat waktu, serta ketidakakuratan data DTSEN sebagai dasar penetapan sasaran yang tidak selalu mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini para pendaftar.

Integration (integrasi) difokuskan pada tingkat koordinasi dan komunikasi internal antarbagian dalam organisasi, serta komunikasi eksternal dengan masyarakat sebagai sasaran program. Dalam pelaksanaannya, koordinasi internal antara Dinas Pendidikan berjalan dengan baik. Namun pada aspek eksternal,

sosialisasi program *Be Smart* masih belum optimal dan belum merata, terutama di wilayah pinggiran Kota Madiun, sehingga sebagian masyarakat yang berhak tidak mendapatkan informasi yang memadai dan kehilangan kesempatan untuk mendaftar. Adaptasi (*adaptation*) berfokus pada kemampuan Dinas Pendidikan Kota Madiun dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai kendala dan dinamika yang muncul selama pelaksanaan program. Dinas Pendidikan Kota Madiun telah menunjukkan komitmen adaptasi yang progresif melalui tiga kali perubahan Peraturan Wali Kota, yakni Perwali Nomor 42 Tahun 2021, Perwali Nomor 65 Tahun 2023, dan Perwali Nomor 47 Tahun 2025, sebagai respons atas evaluasi berkala terhadap kendala yang ditemukan. Namun demikian, pelaksanaan program masih menyisakan permasalahan berupa ketidakstabilan website pendaftaran yang kerap mengalami error serta keterbatasan akses perangkat dan jaringan internet. Dengan demikian, peneliti tertarik memilih judul untuk penelitian yakni **“Efektivitas Program Be Smart (Beasiswa Mahasiswa Rakyat) Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Di Kota Madiun”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang bisa dianalisis lebih lanjut pada penelitian ini yakni, “Bagaimana Efektivitas Program *Be Smart* (Beasiswa Mahasiswa Rakyat) Untuk Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Di Kota Madiun?.”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas program *Be Smart* (Beasiswa Mahasiswa Rakyat) untuk meningkatkan akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu di Kota Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah disampaikan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan dan pemahaman pembaca terkait efektivitas program *Be Smart* (Beasiswa Mahasiswa Rakyat) untuk meningkatkan akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu di Kota Madiun. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi ataupun dasar pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kajian teoritis mengenai efektivitas program beasiswa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam memperkaya pengetahuan terkait efektivitas program beasiswa, serta menjadi referensi tambahan bagi berbagai penelitian selanjutnya yang mengangkat tema sejenis. Seliitu, hasil penelitian ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana penerapan teori maupun pengetahuan telah didapat selama menempuh pendidikan di Program Studi Administrasi Publik.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai penunjang dalam kegiatan pendidikan serta menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat guna mengkaji topik serupa di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga bisa dimanfaatkan sebagai referensi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi sumber pemikiran dan literatur tambahan bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang melakukan penelitian dalam lingkup kajian yang relevan.

3. Bagi Dinas Pendidikan Kota Madiun

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan manfaat, dan bahan pertimbangan evaluasi dalam pengembangan program *Be Smart* pada Dinas Pendidikan.